

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas dan memuat rancangan prioritas pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo ), yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. dan anggaran Pemerintah Propinsi (Bantuan Gubernur).

Substansi Renja SKPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu Renja tahun 2015, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016 serta Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2016.

Dalam Rentra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, tetuang Visi dinas yaitu **“Terwujudnya transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman, dan selamat serta komunikasi dan Informasi yang efektif dan efisien”**. Visi tersebut diyakini akan dapat mengangkat dan mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinhubkominfo.

Sebagai operasionalisasinya maka berdasarkan Visi tersebut telah ditetapkan pula Misi yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Meningkatkan infrastruktur fasilitas jalan dalam rangka keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana angkutan penumpang umum dan barang melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal, pengujian kendaraan bermotor dan perijinan trayek yang baik;

3. Meningkatkan daya jangkau pos, telekomunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi;
4. Meningkatkan penerapan Teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka *e-Government* di Kabupaten Purbalingga.

Atas dasar Visi dan Misi tersebut selanjutnya telah dikembangkan kebijakan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

1. Penambahan Instensitas pembinaan dan diklat pegawai;
2. Pendataan dan prioritas fasilitas lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan;
3. Peningkatan pelaksanaan operasi teknis laik jalan dengan maksud memberi kesadaran kepada para pengusaha angkutan untuk melakukan uji berkala kendaraan dan pembaharuan ijin trayek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
4. Optimalisasi pelayanan dan pemanfaatan TIK

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Purbalingga Tahun 2005

### **C. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra Dinhubkominfo Tahun 2010-2015 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan, Prioritas dan Plafon anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga tahun anggaran 2016
3. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2016
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya pembangunan.

### **D. SISTEMATIKA RENJA DISHUBKOMINFO**

- I. Pendahuluan  
Memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penyusunan Renja Dinhubkominfo Tahun 2016.
- II. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2015
- III. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016
- IV. Rencana Program dan Kegiatan Dinhubkominfo Tahun 2016
- V. Kaidah Pelaksanaan
- VI. Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015**

**A. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinhubkominfo Tahun 2015 dan Capaian Renstra**

**1. Realisasi Pendapatan Dinhubkominfo Tahun 2015**

Pada tahun 2015, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 2.202.210.000,- dan realisasi pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.201.564.925,- atau dicapai sebesar 99,97%. Rincian mengenai target dan realisasi pendapatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
TAHUN 2015**

	<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>TARGET ( Rp. )</b>	<b>REALISASI ( Rp. )</b>	<b>( % )</b>
1.	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.	750.000.000	726.525.000	96,87
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000	530.569.480	106,11
3.	Retribusi Terminal :	<b>792.210.000</b>	<b>801.212.445</b>	101,14
	a. Terminal Purbalingga.	428.514.000	435.935.625	101,73
	b. Terminal Bobotsari.	235.960.000	239.685.000	101,58
	c. Terminal Bukateja.	71.496.000	71.519.820	100,03
	d. Terminal Kejobong.	28.800.000	25.642.000	89,03
	e. Terminal Kutabawa.	8.000.000	8.546.000	106,83
	f. Terminal Kutasari	19.440.000	19.884.000	102,28
4.	Retribusi Ijin Trayek.	160.000.000	143.242.000	89,53
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.202.210.000</b>	<b>2.201.564.925</b>	<b>99,97</b>

## 2. Realisasi anggaran Dinhubkominfo Tahun 2015

Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2015, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 4 program utama dengan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang didukung anggaran belanja sebesar Rp. 11.599.007.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ribu Rupiah), terdiri dari :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 4.090.995.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.963.578.668,- terdapat selisih sebesar Rp. 127.416.332,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 102.546.890,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 4.150.000,- dan Upah Pungut tri bulan III dari retribusi parkir dan ijin trayek belum diambil sebesar Rp. 20.719.442,-
- 2) **Belanja Langsung** sebesar Rp. 7.508.107.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.757.834.811,- atau sebesar 90,67%, terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 750.272.189,-

Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel penggunaan anggaran belanja Dinhubkominfo T.A. 2015 sebagai berikut :

TABEL BELANJA  
DINHUBKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Selisih	%
<b>Belanja Daerah</b>				
<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>	4.090.995.000,-	3.963.578.668,-	127.416.332,-	96,88
<b>Belanja Pegawai :</b>	4.090.995.000,-	3.963.578.668,-	127.416.332,-	96,88
<b>b. BelanjaLangsung</b>	<b>7.508.107.000,-</b>	<b>6.757.834.811,-</b>	<b>750.272.189,-</b>	<b>90</b>
• Belanja Pegawai	732.805.000,-	719.013.000,-	13.792.000,-	98,11
• Belanja Barang dan Jasa	2.207.832.000,-	2.069.177.693,-	138.654.307,-	93,72
• Belanja Modal	4.567.470.000,-	3.969.644.118,-	597.825.882,-	86,91
<b>Jumlah</b>	<b>11.599.102.000</b>	<b>10.721.413.479</b>	<b>877.688.521</b>	<b>92,43</b>

### 3. Capaian Kinerja Dinhubkominfo Tahun 2015

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan Dinhubkominfo selama Tahun anggaran 2015 dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan pada tingkat capaian kinerja rata-rata menunjuk pada pencapaian skala “*baik*”, yaitu 80%, dengan rincian sbb :

- 1) Untuk tingkat capaian **sasaran-1 dan sasaran -2** : yaitu kelancaran administrasi pelayanan dan Ketepatan waktu memberikan pelayanan, menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinhubkominfo menunjukan skala ***baik***, hal ini ditunjukan dengan tingkat capaian kinerja pada skala 89,10%, lebih rinci tersaji dalam matrik dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi	% (R/T)x100%
1. Kelancaran Administrasi pelayanan	Terlaksananya rapat koordinasi	775	775 kegiatan	100
2. Ketepatan waktu memberikan pelayanan	Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD			
	persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu	100 %	100%	100
	persentase realisasi anggaran SKPD	100 %	89,73%	89,73
	Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor	114 pegawai dan masyarakat purbalingga	114 pegawai dan masyarakat purbalingga	100
	Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor	7 gedung, 6 kend. Dinas roda empat, 18 kend.dinas roda dua, komputer dan	9 gedung, 9 kend. Dinas roda empat, 19 kend.dinas roda dua, komputer dan	100
	Terlaksananya diklat	67 pegawai	23 pegawai	34
	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	76,69%	100

- 2) Untuk tingkat capaian **sasaran-3** yaitu kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa, pada tahun 2015 pencapaian kinerja menunjukkan pada skala **baik**, yaitu sebesar 100%, hal ini ditunjukkan dengan telah dilakukannya Revitalisasi dan pembangunan terminal Bobotsari tahap 2, serta dalam proses pengusulan peningkatan menjadi tipe A, dan diharapkan pada tahun 2017 pembangunan akan berlanjut. Pada saat ini di Kabupaten Purbalingga telah memiliki terminal tipe B sebanyak 2, yaitu Purbalingga dan Bobotsari dan 4 terminal tipe C, yaitu Bukateja, Kejobong, Kutasari dan Kutabawa.
- 3) Selanjutnya untuk pencapaian **sasaran -4**, yaitu pelayanan bidang angkutan penumpang umum dan barang yang berkualitas, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran tersebut menunjukkan pada skala **baik**, yaitu sebesar 85,41%, hal ini disebabkan pada indikator jumlah ijin trayek yang dikeluarkan hanya tercapai 70% dari target yang ditetapkan, dan indikator jumlah orang melalui terminal mengalami penurunan yaitu hanya tercapai sebesar 39,25%.

Untuk lebih jelas tingkat capaian kinerja sasaran 3 dan 4 tersaji dalam matrik dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi	% (R/T)x100
Kelancaran Mobilitas orang, barang dan jasa	Jumlah terminal ; ▪ Type B :	2	2	100
	▪ Type C	4	4	100
Pelayanan bidang angkutan penumpang umum dan barang yang berkualitas	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.870.082	1.431.531	76,54
	Jumlah trayek ; ▪ Dalam Kabupaten (Angkudes)	26	26	100



▪ Dalam Kota (Angkota)	14	14	100
Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan (perpanjangan)	155	109	70
Jumlah uji kir angkutan umum / barang	9.471	11.999	126,69
Jumlah orang melalui terminal per tahun	3.742.020	1.469.006	39,25

4) Sementara pada pencapaian **sasaran-5** yaitu dalam rangka keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas menunjukkan pencapaian pada skala yang **amat baik** yaitu sebesar 161,83%, terbukti dengan telah terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan yang meningkat, hal ini dimaksudkan untuk dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas sampai pada tingkat *zero accident* di Kabupaten Purbalingga.

Adapun pencapaian sasaran ini tersaji dalam matrik dibawah ini,yaitu :

Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi	% (R/T)x100%
Keamanan , ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Rambu Lalu Lintas :			
	• Marka	200 m <sup>2</sup>	378,51m <sup>2</sup>	189
	• Rambu Standar	25 bh	48	192
	• RPPJ	2 bh	3	150
	• Road Barrier,	0 bh	0	0
	Traffic cone	0	0	0
	• Guard Rail	200 m	280 m	140
	• APILL :			
• Traffic Light	1 unit	0 unit	0	
• Warning Light	1 unit	3 unit	300	

5) Pada pencapaian **sasaran-6**, yaitu kemudahan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat menunjukkan pada skala **amat baik**, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sasaran sebesar 140%. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, indikator Jumlah hot spot area di ruang publik pencapaian kinerja terjadi kenaikan menjadi 500% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tersaji dalam matrik dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi	% (R/T)x100
Kemudahan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat	Jumlah desa yang terjangkau layanan telekomunikasi	230 desa	237 desa	84
	Jumlah Warung internet	170	60	35
	Jumlah hot spot area di ruang publik	16	80	500
	Rasio penduduk pengguna internet	30%	40%	133
	Rasio penduduk pengguna telepon / hp	50%	70%	140
	Jumlah SKPD memiliki website	28	28	100
	Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) pemerintahan daerah yang terintegrasi	39	39	100
	Jumlah pelayanan publik secara online	29	29	100
	Jumlah publikasi Pemda melalui siaran radio	365	365	100
	Jumlah kegiatan pembangunan/pemerintahan yang terdokumentasi	336	365	109

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain.

- 1) Terbatasnya sarana / prasarana untuk operasional kegiatan Dinhubkominfo, terutama peralatan pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang kondisinya sudah tua, dan belum pernah diadakan penggantian/revitalisasi.
- 2) Karena faktor alam dengan adanya hujan terus menerus disertai petir sering berakibat kepada kerusakan APILL, baik traffic light maupun warning light sehingga dapat mengacaukan arus lalu lintas termasuk pada pemancar radio.
- 3) Fasilitas perlengkapan jalan khususnya rambu lalu lintas, traffic cone dan road barrier yang sering diambil orang yang tidak bertanggung jawab ( hilang ), sehingga tiap tahun perlu diadakan pengadaan
- 4) Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai teknik APILL dan teknik bangunan (konstruksi)
- 5) Kondisi gedung khususnya gedung pengujian kendaraan bermotor dan gedung LPPL Radio Purbalinga yang harus diperbaiki karena sudah tidak memadai/kurang representatif ( rusak berat )

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinhubkominfo mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

- 1) Mengusulkan kegiatan Revitalisasi peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, atau paling tidak setiap tahun untuk dianggarkan kegiatan Kalibrasi dan Tera Uji pada peralatan Uji Kir Kendaraan Bermotor agar peralatan pengujian tetap sesuai standar yang ditetapkan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.

- 3) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik setiap bulan melalui rapat koordinasi antar bidang terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pehubungan, komunikasi dan informatika.
- 4) Mengusulkan pada tahun anggaran 2016 penambahan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kantor khususnya untuk perbaikan gedung pengujian kendaraan bermotor
- 5) Mengusulkan rehab gedung LPPL Radio Purbalingga
- 6) Merencanakan studi banding di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

Dalam rangka mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi ditahun 2016 diupayakan melalui penyusunan konsep perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mendasarkan pada potensi riil, mengoptimalkan potensi sumber daya internal secara nyata, meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja Kegiatan Tahun 2015 secara lengkap tersaji dalam matrik sebagai berikut :











## B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinhubkominfo Tahun 2015

### 1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

#### 1.1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan, yaitu Pelayanan Angkutan Jalan, terdiri dari :

##### 1.1.1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan dengan indikator ::

- a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten, dengan target nasional sebesar 75% dan tingkat capaian tahun 2015 sebesar 92%.
- b. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 80%

##### 1.1.2. Jaringan Prasaranan Angkutan Jalan dengan indikator :

- a. Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 30%
- b. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 40% dan tingkat capaian sebesar 90%.

- 1.1.3. Fasilitas Perlengkapan Jalan, dengan indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 86,02%
- 1.1.4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 100%
- 1.1.5. Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator :
  - a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal, dengan target nasional sebesar 50% dan tingkat capaian sebesar 73%
  - b. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala pada kendaraan bermotor, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 71%
  - c. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten, dengan target nasional sebesar 83% dan tingkat capaian sebesar 16,41%
  - d. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 57%
- 1.1.6. Pelayanan Keselamatan, dengan indikator terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani

trayek di dalam Kabupaten, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 80%.

## **1.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan informatika**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus di laksanakan, yaitu :

1.2.1. Pelaksanaan Desiminasi Informasi nasional, dengan indikator Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional dengan indikator : :

- a. Media massa seperti Radio Suara Perwira dan Radio Ardi Lawet FM, dengan dengan target nasional sebanyak 12 kali dan tingkat capaian sebesar 200% (24 kali)
- b. Media baru website (media online) [www.purbalinggakab.go.id](http://www.purbalinggakab.go.id), dengan target nasional dilaksanakan setiap hari dan tingkat capaian sebesar 100% (dilaksanakan setiap hari)
- c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, dengan target nasional sebanyak 2 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 3 kali atau 150%
- d. Media interpersonal seperti saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya, dengan target nasional sebanyak 12 kali setahun dan tingkat capaian sebanyak 39 kali dalam setahun atau 325%
- e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho, dengan target nasional sebanyak 12 kali hun dan tingkat capaian sebesar 12 kali setahun atau 100%

1.2.2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan, dengan target nasional sebanyak 9 KIM dan tingkat capaian sebanyak 9 KIM atau 100%,

Lebih rinci mengenai capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersaji dalam matrik dibawah ini :

BAB III  
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

**I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten**

**a) Urusan Perhubungan**

Arah kebijakan pembangunan sub sektor perhubungan darat adalah

1. Penambahan intensitas pembinaan dan diklat pegawai guna peningkatan kualitas SDM;
2. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan
3. Peningkatan Fasilitas Angkutan khususnya fasilitas Terminal
4. Peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui pelaksanaan operasi tehnis laik jalan dengan maksud memberi kesadaran kepada para pengusaha angkutan untuk melakukan uji berkala kendaraan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

**b) Urusan Komunikasi dan Informatika**

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk :

- 1) Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
- 2) Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka **e-Government** di Kabupaten Purbalingga
- 3) Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK.)

## **II. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinhubkominfo**

Guna mewujudkan kebijakan tersebut dan mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinhubkominfo mempunyai Tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya tertib administrasi;
2. Meningkatnya kualitas SDM di bidang lalu lintas, angkutan, komunikasi dan informatika;
3. Meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas;
5. Meningkatnya pengawasan angkutan penumpang umum dan barang melalui operasi teknis laik jalan di terminal maupun di jalan;
6. Meningkatnya kelancaran akses jaringan TIK di Kabupaten Purbalingga.

### **Sasaran Dinhubkominfo**

Dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran administrasi pelayanan
2. Ketetapan waktu memberikan pelayanan
3. Keamanan, Ketertiban, Kelancaran, dan keselamatan lalu lintas
4. Kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa
5. Pelayanan bidang angkutan penumpang umum dan barang yang berkualitas
6. Kemudahan layanan komunikasi dan informatika bagi masyarakat

## **III. Program dan Kegiatan**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 4 (empat) program yaitu sebagai berikut:

1. Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan manajemen dan fasilitas Lalu Lintas
3. Program Peningkatan pelayanan Angkutan
4. Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

**1. Program penguatan kelembagaan daerah,** dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Bahan dan Jasa perkantoran
- 2) Rapat koordinasi dan konsultasi
- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 4) Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor
- 5) Pendidikan dan pelatihan pegawai
- 6) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
- 7) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
- 8) Penyusunan Tataran Transportasi Lokal

**2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatannya :**

- 1) Pengelolaan Kebersihan Terminal
- 2) Pelaksanaan Operasi Tehnis Laik Jalan
- 3) Pengadaan Bahan Pengecatan PKB
- 4) Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- 5) Revitalisasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- 6) Fasilitasi Pembangunan Bandara

**3. Program Peningkatan manajemen dan fasilitas Lalu Lintas, dengan kegiatannya :**

- 1) Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- 2) Pemeliharaan Traffic light dan warning light
- 3) Pengadaan Fasilitas keselamatan jalan (DAK)

- 4) Pengadaan Perlengkapan Jalan (aspirasi dari Kecamatan/masyarakat)
- 5) Pembinaan Perparkiran
- 6) Fasilitasi Forum LLAJ
- 7) Fasilitasi Tim Andalalin

**4. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatannya :**

- 1) Pemeliharaan website dan jaringan internet
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi
- 3) Pembinaan dan Monitoring PLIK dan Warnet
- 4) Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- 5) Teleconference, SMS center dan Paper Less Office
- 6) Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE
- 7) Operasional pendampingan PPID
- 8) Operasional Pendampingan Penyiaran

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2017 tersaji dalam matrik di bawah ini :



## BAB IV P E N U T U P

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2017, seluruh pejabat dilingkungan Dinhubkominfo wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam Renja Tahun 2017, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) Desa / Kelurahan, Musrebang Kecamatan, forum SKPD dan forum gabungan SKPD, serta Musrenbang Kabupaten.

Renja Tahun 2017 merupakan acuan bagi Dinhubkominfo dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinhubkominfo termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2017 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2017 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Dinhubkominfo dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2017.

3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan
4. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2017 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2017 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman dan selamat serta komunikasi dan informasi yang efektif dan efisiensi dapat segera terwujud.

Pubalingga, April 2016

KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
Drs. YONATHAN EKO NUGROHO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610225 198603 1 010



